

**PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

Executive Summary



Diajukan oleh:

FAHRUR ROZI

2110012111226

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

Fahrur Rozi¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: fahrur9878@gmail.com

ABSTRACT

The West Pasaman Regent's Accountability Information Report (LKPJ) to the DPRD in 2022 was prepared based on the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 13 of 2019 concerning Reports and Evaluation of Regional Government Implementation. Problem formulation: 1) What is the procedure for preparing the report government accountability in West Pasaman district in ? 2) What are the obstacles faced in the process of preparing the government accountability report in West Pasaman district in 2022? 3) What efforts can the Government take to increase the effectiveness and efficiency of procedures for preparing government accountability reports in West Pasaman district 2022? Types of sociological juridical research. The data sources used were primary and secondary data, then data collection techniques using document studies and interviews were analyzed qualitatively. Research results: 1) The procedural process for preparing government accountability reports in West Pasaman Regency involves structured stages, including collecting financial data, performance analysis, and preparing reports based on applicable regulations. 2) The obstacles faced include all reports having to be completed simultaneously. This has resulted in several sections assigned to make LKPJ having difficulties in allocating time, changes in section heads, data delays, poor data quality, and finally inadequate information systems. 3) Efforts made by holding coordination meetings, issuing warning letters from the leadership, warning letters are firm steps that can be taken to overcome delays in reporting data, and provide understanding to new sections.

Keywords: Procedure, Accountability Report, Regional Head, DPRD, West Pasaman Regency.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (APBD) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan APBD, diharapkan setiap daerah dapat mencapai tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh

wilayah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien, dan partisipatif, harus menjadi dasar APBD di seluruh Indonesia, termasuk pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pengelolaan APBD harus bebas dari penyimpangan.

DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan APBD sesuai rencana, perundang-undangan, dan

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada praktiknya, ada sebuah kasus Korupsi dana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Pasaman Barat. Kasus itu bermula ketika Pemkab Pasaman Barat menganggarkan dana pembangunan senilai RSUD Pasaman Barat 2018- 2020 dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan anggaran Rp 136.119.063.000. Dalam pelaksanaan diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16.239.364.605,46.

Dalam perjalanannya, PN Tipikor Padang menjatuhkan vonis bersalah untuk 7 terdakwa dengan hukuman beragam 2-4 tahun. Tujuh orang tersebut adalah 4 orang Pokja, satu orang pengatur pemenang tender, satu orang manajemen konstruksi dan satu PPK. Hakim juga memutuskan ada kerugian negara hanya sekitar Rp 7,3 miliar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
2. Apa saja kendala–kendala dalam Proses Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penyusunan Laporan

pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
2. Untuk menganalisa kendala-kendala dalam Proses Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Sosiologis/Empiris.
2. Sumber Data
Sumber data Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer,dan Bahan Hukum Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Studi dokumen dan Wawancara
4. Teknik Analisis Data
Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pasaman Barat Kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yandra Hanafi Lubis yang menjabat sebagai kepala

bagian Tata Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Januari 2024. Secara umum, prosedur penyusunan LKPJ pemerintahan melibatkan tata cara sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan :
 - 1.1 Penetapan Tim LKPJ
 - 1.2 Penyusunan TOR dan Pedoman Penyusunan LKPJ
 - 1.3 Pengumpulan Data dan Informasi
2. Tahap Penyusunan :
 - 2.1 Analisis dan Capaian Evaluasi Kerja
 - 2.2 Penyusunan Rancangan LKPJ
 - 2.3 Konsultasi Public
 - 2.4 Penyempurnaan LKPJ
3. Tahap Penetapan :
 - 3.1 Penyampaian LKPJ Kepada DPRD
 - 3.2 Pembahasan LKPJ oleh DPRD
 - 3.3 Penetapan LKPJ
 - 3.4 Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat Kepada DPRD

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yandra Hanafi Lubis yang menjabat sebagai kepala bagian Tata Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Januari 2024. Secara umum, prosedur penyusunan LKPJ pemerintahan melibatkan tata cara sebagai berikut:

1. Kesalahan yang Berulang seperti keterlambatan dalam pengisian format LKPJ. Alasan utama seringnya terjadi

kesalahan ini dikarenakan seluruh Laporan yang adadi Pemerintahan Daerah harus diselesaikan secara bersamaan. Hal ini membuat beberapa bagian yang ditugaskan untuk membuat LKPJ kesulitan dalam membagi waktu.

2. Adanya pergantian kepala bagian dan kurangnya pemahaman akan LKPJ
3. Keterlambatan Data
4. Kualitas Data yang kurang baik

C. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Bupati Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepada DPRD.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yandra Hanafi Lubis yang menjabat sebagai kepala bagian Tata Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Januari 2024. Secara umum, prosedur penyusunan LKPJ pemerintahan melibatkan tata cara sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Dari Pimpinan
2. Pemahaman untuk Kepala Bagian Baru
3. Timeline Yang Jelas
4. Monitoring dan Evaluasi

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pasaman Barat kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
 - a. Proses pembentukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, finalisasi, penyampaian, pembahasan, hingga tindak lanjut. Tim penyusun LKPJ dibentuk, yang terdiri dari

- perwakilan berbagai OPD terkait dan dipimpin oleh sekretaris daerah.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat kepada DPRD di Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :
 1. Kesalahan yang Berulang dalam pengisian format LKPJ.
 2. Adanya Pergantian Kepala Bagian yaitu dari Kepala Bagian lama kepada Kepala Bagian yang barudan Kurangnya Pemahaman akan LKPJ.
 3. Keterlambatan Data yaitu Data yang akan dilaporkan dalam LKPJ seringkali belum siap pada saat proses penyusunan LKPJ dimulai.
 4. Kualitas Data yang Kurang Baik yaitu data yang diserahkan oleh SKPD terkadang tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak konsisten.
 5. Sistem Informasi yang Belum Memadai.
 3. Upaya-Upaya yang dapat dilakukan Bupati untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, antara lain :
 1. Surat Peringatan dari Pimpinan. Surat peringatan merupakan langkah tegas yang dapat diambil untuk mengatasi keterlambatan pelaporan data.
 2. Memberikan Pemahaman untuk Kepala Bagian Baru
 3. Membuat Timeline yang Jelas
 4. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar OPD
 5. Meningkatkan Kinerja Pemerintah
 6. Meningkatkan kepercayaan publik

B. Saran

- Berdasarkan Hasil penelitian tentang proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Berikut beberapa saran untuk mengatasi kendala yang dihadapi
1. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
 2. Memperkuat Kapasitas SDM
 3. Memperbaiki Sistem dan Prosedur
 4. Meningkatkan Sinergi dengan BPS
 5. Meningkatkan Sanksi dan Reward

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta..
- Mardiasmo .2023. *APBD: Teori dan Praktik*. Edisi 10. Andi. Yogyakarta.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum LPPM* Universitas Bung Hatta. Padang.
- Moenta, dkk.2017. *Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 2003. *Hukum Progresif*. PT Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Swasono, Sri Edi.2023. *APBD: Konsep, Penyusunan, dan Analisisnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Swasono, Sri Edi.2023. *APBD: Konsep, Penyusunan, dan Analisisnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Utrecht, E. 1965. *Pengantar Hukum Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023.

Sumber Lain.

Arsyad, A. (2022). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 10(1), 1-14.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020. <https://www.bpk.go.id/>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://www.kemendagri.go.id/>

Kompas.com. 2023. *Babak Baru Kasus Korupsi RSUD Pasaman Barat, Penyidik Limpahkan 4 Berkas Perkara Ke JPU.* <https://regional.kompas.com/read/2023/10/04/120735478/babak-baru-kasus-korupsi-rsud-pasaman-barat-penyidik-limpahkan-4-berkas>

Marbun, M. 2012. *Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).

Universitas Andalas. (2022). *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.* *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(2).